
ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PRODUKSI PERTANIAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KABUPATEN BREBES

Hilda Firdaus¹, Sesar Apriliyanto², Nabil Abdullah³, Riany Kencanawati⁴, Yuni Khiyaroh⁵
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

e-mail: firdaushilda@gmail.com¹, afrisaesar@gmail.com², nabilkun30@gmail.com³,
kencanawatiriany@gmail.com⁴, yunikhiyaroh02@gmail.com⁵

Accepted: 11/9/2024; **Published:** 13/9/2024

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam penilaian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga. Kemiskinan sampai sekarang masih menjadi permasalahan yang dihadapi diberbagai wilayah, Jawa Tengah juga termasuk wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Salah satu wilayah yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes. Sektor pertanian masih menjadi andalan dalam penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar. Sektor pertanian memegang peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Sektor pertanian memiliki peran dalam pembangunan nasional sebagai pemasok bahan kebutuhan pangan dan bahan baku industri, penyedia lapangan kerja, dan sumber devisa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi terkait pengembangan dan kebijakan pangan produksi pertanian dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Brebes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dengan 11 narasumber dan observasi ke lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lain di Kabupaten Brebes. Upaya revitalisasi sektor pertanian dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di Kabupaten Brebes masih terdapat beberapa hambatan seperti minimnya fasilitas irigasi, tingginya biaya *input* produksi padi dengan harga pupuk, serta rendahnya tingkat produktivitas padi dan minimnya akses pasar.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kebijakan, Sektor Pertanian.

ABSTRACT

Poverty is one of the indicators in the assessment to determine the level of welfare of a household. Poverty is still a problem faced in various regions, Central Java is also an area with a high number of poor people. One of the areas with the highest number of poor people in Central Java is Brebes Regency. The agricultural sector is still the mainstay in creating jobs in quite large numbers. The agricultural sector plays a strategic role in national economic development. The agricultural sector has a role in national development as a supplier of food and industrial raw materials, a provider of jobs, and a source of foreign exchange. The purpose of this study is to analyze strategies related to the development and policy of agricultural food production in overcoming poverty in Brebes Regency. The research method used is a qualitative research method with a case study type of research, data was collected through interviews with

11 informants and field observations. The results of this study indicate that the agricultural sector has the largest contribution compared to other sectors in Brebes Regency. Efforts to revitalize the agricultural sector in accelerating poverty reduction in Brebes Regency still have several obstacles such as minimal irrigation facilities, high input costs for rice production with fertilizer prices, and low levels of rice productivity and minimal market access.

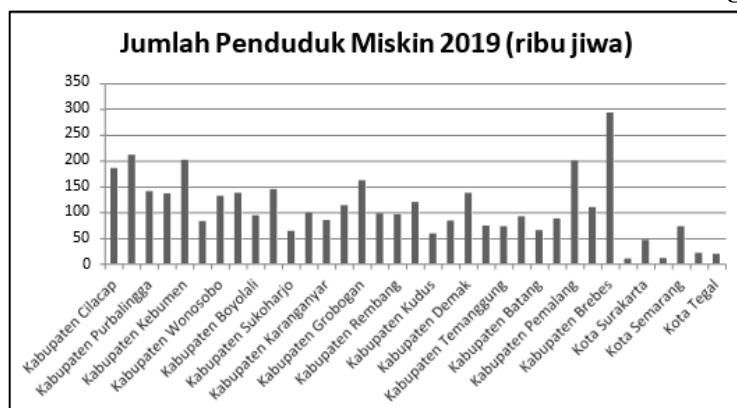
Keywords: Poverty, Policy, Agricultural Sector.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam penilaian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi fokus pembangunan tersendiri dari beberapa wilayah untuk menurunkan angka kemiskinannya. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan disuatu daerah salah satunya dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan wilayahnya. Kemiskinan terjadi dikarenakan kemampuan dari individu penduduk belum bisa menjadikan dirinya sebagai pelaku ekonomi yang pada akhirnya membuat dirinya tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan suatu penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun yang tidak bersifat tidak langsung telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun lokal. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga yang sangat miskin (Mahsunah, 2013). Kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang maksimal, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2010).

Dari data BPS Jawa Tengah terlihat bahwa tingkat kemiskinan rata-rata di Wilayah Jawa Tengah tahun 2019 mencapai 10,58% dari jumlah penduduk yang ada. Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.26% menjadi 11.84% dari total jumlah penduduk dan mengalami penurunan ditahun berikutnya yaitu Tahun 2021 sebesar 0.59% menjadi 11.25% dari total jumlah penduduk di Jawa Tengah. Dari sekian banyak jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah salah satu Daerah yang memiliki penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Brebes. Upaya pemerintah untuk selalu menekan angka kemiskinan terus dilakukan dengan berbagai program misalnya adanya program Dana Desa, namun sampai sekarang masih fluktuatif (Darmi, 2019).

Gambar 1. Daftar Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah 2019



Sumber: Data diolah dari BPS Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Brebes menduduki peringkat terbanyak di Jawa Tengah pada tahun 2019 hingga mencapai 23,20 ribu penduduk miskin. Menurut Hidayat dan Supriharjo (2014) pengembangan sumberdaya wilayah yang berasal dari sektor pertanian menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan karena dengan adanya pengembangan sumberdaya wilayah pertanian diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Sektor pertanian di Kabupaten Brebes telah berperan banyak dalam peningkatan perekonomian melalui pembentukan PDRB, penyediaan pangan dan bahan baku industri, dan penyedia lapangan pekerjaan.

Sektor pertanian masih menjadi andalan dalam penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar (Nadziroh, 2020). Menurut Solahuddin (2009) sektor pertanian memegang peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Sektor pertanian memiliki peran dalam pembangunan nasional sebagai pemasok bahan kebutuhan pangan dan bahan baku industri, penyedia lapangan kerja, dan sumber devisa. Dalam rangka melaksanakan peran strategis tersebut, sektor pertanian berupaya untuk terus memperbaiki kinerja pembangunannya. Menurut Hernanto (1993), Sektor Pertanian sangat memerlukan teknologi untuk keberhasilan produktivitas usaha tani. Dalam pembangunan pertanian, pemerintah Indonesia berupaya adanya perubahan teknologi di dalam usahatani baik teknologi pra panen maupun pasca panen. Disamping itu pemilihan dan penggunaan teknologi secara tepat akan berpeluang untuk menekan biaya produksi, menekan harga jual, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan.

Menurut Sajogyo (2002), tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan disebabkan kebijakan pembangunan cenderung bias perkotaan dan sektor industri, sementara alokasi anggaran sektor pertanian menurun drastis. Kebijakan ini dinilai keliru karena memarginalkan hak masyarakat dan menumbuhkan kantong-kantong kemakmuran masyarakat perkotaan di tengah kemiskinan masyarakat pedesaan. Pertumbuhan pada sektor pertanian memberikan pengaruh dalam penyediaan jumlah produksi, keterjangkauan, dan harga pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin, melalui peningkatan dayabeli.

Kabupaten Brebes merupakan daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa. Luas wilayah Kabupaten Brebes yaitu sebesar 176.962 hektar yang terdiri atas 80.256 hektar (45,35%) luas panen sawah dan 66.706 hektar (37,70%) luas panen lahan kering (BPS Kabupaten Brebes, 2020). Selain itu, dilihat dari penyerapan tenaga kerja dari 823.181 orang yang bekerja, sejumlah 260.588 orang (31,66%) bekerja di bidang pertanian (BPS, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang masih mengandalkan sektor pertaniannya dalam menunjang pembangunan perekonomian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan 11 narasumber yang terdiri dari 2 orang Dinas Pertanian, 2 orang petani penggarap, 2 orang pemilik lahan, 2 orang pelaku usaha tani dan 3 orang masyarakat setempat. Serta data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes, peraturan-peraturan, serta sumber lain yang relevan dalam mengkaji, menganalisis mengenai pengentasan kemiskinan dan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Produksi Pertanian di Kabupaten Brebes

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan nasional terutama dalam penyusunan konsep dan implementasi kebijakan perekonomian Indonesia. Sektor pertanian juga merupakan hal yang substansial dalam pembangunan, yaitu sebagai pemenuh kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri, penyedia lapangan kerja, dan penyumbang devisa negara (Winangun, 2005).

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pertanian, perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Brebes mengalami penurunan, hal ini dikarenakan minat pemuda untuk bertani semakin berkurang dan lebih memilih untuk menjadi buruh pabrik dan bidang lainnya selain tani. Sektor pertanian di kabupaten Brebes merupakan sektor yang memiliki peran paling dominan di dalam pertanian di kabupaten Brebes ini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Brebes dibandingkan sektor lainnya. Sejak tahun 2016 peranan sektor pertanian pada PDRB terus mengalami penurunan, mulai dari persen pada tahun 2016 sampai mencapai angka 40,41 persen pada tahun 2019 dengan rata-rata 35,65 persen sepanjang tahun 2016-2019 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 sebesar 37,38 persen.

Upaya Revitalisasi Sektor Pertanian dalam Mempercepat Pengurangan Kemiskinan

Dalam pelaksanaannya karena pada umumnya petani di Indonesia merupakan petani kecil dengan lahan yang terbatas dan modal yang kecil, dan dianggap tidak *bankable*, maka diperlukan kredit dari pemerintah. modernisasi pertanian membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi petani untuk memulai usaha pertaniannya. Dana itu digunakan untuk membeli benih unggul, pupuk buatan, pestisida anti hama, dan biaya perawatan tanaman. Semuanya membutuhkan dana yang tidak kecil, suatu kondisi yang berbeda dibanding sistem budi daya padi pada masa sebelumnya. Dana yang diperoleh dari kredit digunakan petani untuk membeli sarana produksi pertani-an (Saprodi). Semuanya itu dibutuhkan untuk penerapan teknologi baru bagi petani. Pada awalnya, kredit hanya diterima petani sebagai insentif karena mengadopsi teknologi baru dalam rangka menaikkan produksi beras. Selanjutnya, kredit juga diberikan untuk berbagai macam tanaman palawija, termasuk jagung, kedelai, kacang tanah, padi gogo, sorgum dan kacang hijau.

Pertanian merupakan sektor yang penting dalam perekonomian di Kabupaten Brebes karena sebagian besar penduduknya bekerja di pertanian. Peran yang lebih besar di emban oleh sektor pertanian karena merupakan sektor yang mempunyai kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Brebes jika dibandingkan dengan sektor lain. tapi pada kenyataan yang terjadi di sektor pertanian masih terdapat banyak penduduk miskin didalamnya. Selain itu pula, permasalahan yang berkenaan dengan resiko yang dihadapi dalam usaha tani perlu segera diselesaikan dikarenakan guna mencapai keberhasilan pertanian dalam upaya mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Brebes. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur

Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Brebes berperan penting dalam kerjasama dengan institusi terkait lainnya. Dalam menghadapi masalah utama yaitu bertambah langkanya sumber air yang mengakibatkan labatnya pertumbuhan hasil pertanian yang teririgasi. Tantang dalam menghadapi langka sumber air ini diperbesar dengan terus bertambahnya biaya dalam penyediaan sumber air yang baru, pencemaran tanah di daerah irigasi, penipisan persediaan air tanah, populasi air dan penurunan mutu ekosistem yang berhubungan dengan air, serta pemborosan penggunaan air ditempat suplai air yang telah selesai dibangun. Permasalahan yang berkaitan dengan irigasi ini tidak terlepas dari adanya

fasilitas infrastruktur yang ada disuatu wilayah. Pertanian yang telah memiliki system irigasi sangat penting, dan harus dipandang sebagai aktivitas antar sektor. Pemerintah perlu memastikan integritas infrastruktur dengan keterlibatan pengguna irigasi secara lebih intensif, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk mencapai panen yang lebih optimal hingga setiap tetes air. Guna melaksanakan revolusi hijau secara luas melalui program intensifikasi produksi diperlukan dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan irigasi yang membutuhkan dukungan dengan yang relative besar.

2. Perbaikan Tingkat Produktifitas

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhannya melalui hasil tani yang mereka dapat jika harganya mengalami tidak kestabilan. Salah satu upaya yang bisa digunakan untuk melakukan percepatan pengurangan kemiskinan yaitu adanya perbaikan produktifitas, dimana perbaikan ini bisa dilakukan dengan cara pembaharuan teknologi. Pertanian yang mengacu kepada peningkatan produktifitas yang tinggi haruslah didukung oleh kemampuan teknologi yang memadai. Kemajuan teknologi pada kenyataannya mampu meningkatkan produktivitas teori pertumbuhan bariu menunjukkan bahwa teknologi bersifat endogen dan produktivitas dapat terus tumbuh dengan adanya kemajuan teknologi secara internal.

Adanya tujuan teknologi adalah untuk memperbaiki usaha tani baik dari segi produksi atau produktivitas. Kondisi tertentu perubahan teknologi dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti yang dikatakan Pak Hilman selaku bagian Ketahanan pangan di Dinas Pertanian dan Petahanan Pangan (DPKP) beliau menyatakan akan adanya teknologi Jepang yang diterapkan di Kabupaten Brebes di Sektor Pertanian yaitu Pembuat Bedengan sawah.

3. Penyediaan Bibit Padi dan Pupuk

Harga hasil produksi usaha tani berpengaruh pada keuntungan, dengan hasil yang lebih tinggi dan harga yang mahal meningkatkan keuntungan. Namun, harga sarana produksi (saprodi) seperti alat pertanian, benih, bibit, pupuk, dan obat-obatan juga mempengaruhi penerimaan petani karena merupakan modal utama. Pengelolaan lahan yang baik dapat meningkatkan hasil, dan pemberian pupuk sesuai dosis mendukung pertumbuhan tanaman. Ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau penting untuk ketahanan pangan. Meskipun pemerintah memberikan subsidi pupuk, distribusi yang terbatas dan kelangkaan pupuk atau benih dapat meningkatkan harga dan membebani petani. Kurangnya pengawasan memungkinkan spekulasi mencari keuntungan, sementara biaya distribusi yang tinggi mempersulit pengecer dan distributor. Dalam mengatasi masalah ini, penguatan kelompok tani menjadi penting untuk efisiensi distribusi pupuk dan benih serta mendukung kelangsungan produksi pertanian.

Strategi Kebijakan Pangan Produksi Pertanian dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Brebes

Konsep ketahanan pangan (*Food Security*) lebih luas daripada swasembada pangan, yang hanya fokus pada kecukupan produksi bahan pangan. Ketahanan pangan mencakup dua unsur utama: ketersediaan pangan dan akses masyarakat terhadap pangan. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, suatu daerah belum dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik, meskipun pangan cukup tersedia. Akses yang tidak merata dapat menyebabkan ketahanan pangan yang rapuh.

Pembangunan pertanian bertujuan memajukan agribisnis dengan membangun sinergi antara berbagai aspek, yaitu: 1) Industri Hulu Pertanian (pembenihan, input produksi, alat mesin pertanian), 2) Pertanian Primer, 3) Industri Hilir Pertanian (pengolahan hasil), dan 4) Jasa penunjang agribisnis. Agar agribisnis berkembang, pelaku agribisnis membutuhkan

insentif ekonomi yang dapat meningkatkan daya tarik sektor ini. Tanpa insentif, mereka akan enggan mengembangkan agribisnis.

Keadaan Kemiskinan di Kabupaten Brebes

Tabel 1. PDRB Per Kapita Kabupaten Brebes (Ribu Rupiah) 2015-2017

Wilayah	PDRB Per Kapita Kabupaten Brebes (Ribu Rupiah)		
	2015	2016	2017
Kabupaten Brebes	19337.31	20903.88	22318.41

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Tabel 1 menunjukkan tingkat pendapatan perkapita di Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 19337.31 ribu rupiah, menjadi 19337.31 ribu rupiah dan 22318.41 ribu rupiah di tahun 2016 dan 2017. Rendahnya pendapatan masyarakat dapat mengakibatkan pemenuhan akan kebutuhan tidak maksimal, rendahnya pendapatan juga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin, rendahnya pendapatan penduduk akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi karena kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Kesulitan Melakukan Diversifikasi

Usaha Pertanian Kesulitan petani dalam melakukan diversifikasi pertanian sangat tinggi karena kondisi geografis dan ketrampilan yang dimiliki sangat minim. Kondisi lahan pertanian yang relatif kering disebabkan oleh letak desa tersebut yang berada di perbukitan yang tandus dan tidak adanya sistem irigasi. Hal ini membuat petani tidak dapat melakukan diversifikasi pertanian, karena hanya dapat ditanam oleh tanaman palawija (jagung, cabai, bawang, kacang hijau). Lahan pertanian yang mengandalkan hujan (tadah hujan) membuat petani sering mengalami gagal panen, terutama untuk komoditas bawang. Ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani tentang pertanian hanya terbatas pada komoditas pertanian yang sedang mereka tekuni. Ini disebabkan karena tidak adanya program penyuluhan di desa tersebut. Pengetahuan dan ketrampilan petani didapatkan dengan cara turun temurun.

Kebijakan Pembangunan yang Tidak Memberdayakan Petani

Kebijakan pembangunan yang kurang memberdayakan petani khususnya yang dirasakan oleh petani di Desa Pamulihan adalah subsidi pupuk dan obat yang dirasa kurang tepat sasaran. Hal ini dikarenakan petani merasa kesulitan dalam mendapatkan pupuk dan obat yang telah disubsidi. Dalam hal penyaluran pupuk oleh pemerintah kepada petani melalui distributor, dinilai oleh petani sebagai penyebab mahalannya dan kelangkaan pupuk. Petani menginginkan perubahan pola distribusi pupuk oleh pemerintah, yang tadinya melalui distributor dialihkan kepada kelompok tani untuk dapat langsung disalurkan kepada petani, namun langkah ini juga dinilai masih kurang efektif. Penyaluran pupuk lewat kelompok tani hanya dapat diperoleh petani yang menjadi anggota kelompok tani tersebut.

Program BLT juga dirasa oleh petani kurang bermanfaat, karena yang mereka butuhkan adalah modal, baik berupa hibah maupun pinjaman. Program BLT dirasa kurang bermanfaat karena hanya bersifat sementara dan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Yang petani butuhkan adalah bagaimana untuk dapat mengolah lahan pertanian mereka dengan mudah untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwasannya sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lain di Kabupaten Brebes. Upaya revitalisasi sektor pertanian dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di Kabupaten Brebes terdapat beberapa faktor penghambat revitalisasi pertanian di Kabupaten Brebes yaitu:

1. Minimnya fasilitas irigasi
2. Tingginya biaya input produksi padi yang diproxikan dengan harga pupuk dan bibit padi
3. Rendahnya tingkat produktivitas padi dan minimnya akses pasar.

Disamping itu keadaan kemiskinan di Kabupaten Brebes salah satunya dipengaruhi oleh:

1. Rendahnya pendapatan masyarakat dapat mengakibatkan pemenuhan akan kebutuhan tidak maksimal.
2. Kurangnya Kebijakan Pembangunan yang tidak Memberdayakan Petani dapat meningkatkan jumlah kemiskinan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S.1997. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Aldila, Haris Fatori; Fariyanti, Anna; Tian Aprilla, Netti. (2017). Daya saing bawang merah di wilayah sentra produksi di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 14.1: 43-43.
- Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Nasional di Indonesia Tahun 2005-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8 No. 1. Hal: 39-48. Surakarta: USM.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bank Indonesia (2001). *Sejarah Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Kecil*. Jakarta: Biro Kredit Bank Indonesia.
- BPS Kabupaten Brebes. 2020. *Kabupaten Brebes Dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Brebes. Brebes.
- BPS Kabupaten Brebes. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes*. Kabupaten Brebes.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah*. Kota Semarang.
- Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah Untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 43- 62.
- Krismono, B. D., & Nasikh, N. (2022). Inovasi Teknologi Digital untuk Pengentasan kemiskinan pada Pertanian Dataran Tinggi saat Pandemi Covid-19.
- Prabowo, R. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Jurnal mediagro* . Vol 6. No 2..Hal: 62 - 73
- Purwanto, J., Fajarningsih, R. U., & Ani, S. W. (2010). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 25(1), 38-42.
- Rinardi, H., Masruroh, N. N., Maulany, N. N., & Rochwulaningsih, Y. (2019). Dampak revolusi hijau dan modernisasi teknologi pertanian: studi kasus pada budi daya pertanian bawang merah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), 125-136.
- Sajogyo. 2002. Pertanian dan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Rakyat* 1(1): 1–15.

Sangaji, M. 2005. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. Perekonomian Indonesia, Deskripsi. Preskripsi dan Kebijakan. Yustika Malang, bayu Media Publishing.

Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Hexagro, 4(1), 1-14.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)